

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di
KABUPATEN KEDIRI PERIODE 2001-2018**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

HERU DARMAWAN

145020100111048



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Abstract

This study aims to determine the effect of capital expenditure on economic growth and also the effect of Locally-generated revenue and balance funds on capital expenditure in Kediri Regency during the period 2001-2018. Capital spending plays an important role in increasing economic growth because it is included in one of the Government Expenditure (G), the independent variable in the first model used in this study is Capital Expenditure, and the dependent variable used is Gross Regional Domestic Product (GRDP). as a representation of economic growth. And in the second model, the variables used are Locally-generated revenue and Balancing Fund as regional income and act as independent variables and Capital Expenditures as dependent variables. The method used in this research is the Ordinary Least Square (OLS) method.

The results of the research on the first model indicate that an increase in capital spending has a positive impact on economic growth. This is because, capital expenditure is included in one of the government expenditure (G). Where, according to the theory of the calculation of GRDP with the expenditure approach with the formula $GRDP = C + I + G + (XM)$, variable G can affect the calculation of GRDP, although in this study the variable G studied was only limited to capital expenditures, but still had a positive and significant effect on GRDP in Kediri Regency 2001-2018. Then, the results of the second study, show that, Locally-generated revenue and Balancing Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures in Kediri District 2001-2018. This is in accordance with the results of previous research conducted by Tang (2014) which states that, "The increase of the government bureaucratic resources, i.e. the financial condition of a government, the increase of the expansion of spending on social welfare programs, one of which is through the regional government investment expenditure policy through capital expenditure "

Keywords: Government Capital Expenditures, GRDP, OLS, Locally-generated revenue, Balancing Funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2001-2018. Belanja modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena termasuk ke dalam salah satu *Government Expenditure*(G), maka variabel independen pada model pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, serta variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi. Dan pada model kedua, variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan sebagai pendapatan daerah dan bertindak sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai Variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil penelitian pada model pertama, menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena, Belanja Modal termasuk ke dalam salah satu *government expenditure*(G). Dimana, menurut teori perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dengan rumus $PDRB = C+I+G+(X-M)$, variabel G dapat mempengaruhi perhitungan PDRB, meskipun dalam penelitian ini variabel G yang diteliti hanya sebatas Belanja Modal saja, namun tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Lalu, hasil penelitian kedua, menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang (2014) yang menyatakan bahwa, "Semakin besar sumber daya birokrasi pemerintah, yaitu keadaan keuangan suatu pemerintahan akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan sosial salah satunya lewat kebijakan pengeluaran investasi pemerintah daerah lewat belanja modal ."

Kata kunci: Belanja Modal Pemerintah, PDRB, OLS, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari tahun 2001, dimana melalui kebijakan ini, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001 :2) otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah propinsi, kabupaten, kota dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur, bupati, walikota. Pemberian otonomi daerah memberikan kebebasan kepada suatu daerah untuk membuat rencana keuangan daerahnya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh kepada kemajuan daerahnya sendiri. Rencana keuangan ini tercantum dalam sebuah dokumen yang disebut dengan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dan, dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui peyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010 : 3).

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat berasal dari Pendapatan daerah sendiri, dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan(Daper), dan Lain-lain pendapatan yang sah. Ketiga sumber pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah otonom tersebut. Dimana, menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang di tahun 2014 menyatakan, “Semakin besar sumber daya birokrasi pemerintah, yaitu keadaan keuangan suatu pemerintahan akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan sosial salah satunya lewat kebijakan pengeluaran investasi pemerintah daerah lewat belanja modal”. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain semakin besar pendapatan dalam APBD, maka seharusnya semakin meningkat

pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini disebabkan lebih banyak dana yang dimiliki daerah tersebut untuk membangun daerahnya dan pada akhirnya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai pengeluarannya sendiri dengan menggali segala sumber dana yang potensial di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. . Lalu, Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Selanjutnya, sumber pendapatan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah, disana disebutkan jika sumber lain dari pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah. Memang tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang termasuk dalam kategori jenis pendapatan ini, namun dapat digaris bawahi bahwa selama masih memenuhi unsur hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, maka apapun jenis sumber tersebut dapat dikategorikan dalam jenis ini. Umumnya yang termasuk dalam sumber jenis pendapatan ini adalah dana darurat dan hibah yang merupakan penerimaan dari daerah lain, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (DJP,2013).

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Menurut SAP, terdapat beberapa macam pengeluaran pemerintah melalui belanja modal diantaranya ada Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, Belanja modal fisik lainnya.

Lalu, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB dalam lingkup regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi di lihat dari PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) yang berarti pula akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah peran pemerintah sangat diperlukan yaitu dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktornya, menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Kurniawan Hakim(2016) yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, dan Belanja Pemerintah, serta ekspor bersih ($Yad = C + I + G + NX$). Namun, dalam penelitian ini, faktor yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dibatasi hanya pada faktor belanja pemerintah khususnya belanja modal saja. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sodik (2007) dengan hasil kesimpulan adanya pengaruh positif yang signifikan atas pengeluaran pemerintah baik pengeluaran

pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sampel yang digunakan dalam regresi data panel ini sebanyak 26 provinsi di Indonesia selama periode 1993-2003.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2001-2018)”

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

John Maynard Keynes adalah ekonom yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab terjadinya great depression. Analisis Keynes dimulai dengan pengenalan bahwa jumlah output perekonomian yang diminta merupakan penjumlahan dari empat jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Jumlah output perekonomian yang diminta disebut permintaan agregat yang dapat ditulis:

$$Y_{ad} = C + I + G + NX$$

Teori ekonomi Keynes ini berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja atau konsumsi pada sebuah sistem perekonomian akan meningkatkan pendapatan, sehingga akan mendorong peningkatan belanja dan pendapatan di masyarakat. Dalam kondisi normal, teori ekonomi Keynes ini menyebutkan bahwa konsumsi yang dilakukan seseorang pada sebuah perekonomian mampu menjadi pendapatan bagi orang lain pada sistem perekonomian yang sama dan siklus ini akan senantiasa berlanjut, sehingga membuat perekonomian berjalan normal. Masyarakat secara alami akan bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung untuk menyimpan uangnya ketika great depression terjadi. Hal ini berdampak berhentinya siklus perputaran uang yang menyebabkan perekonomian melambat. Keynes memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu berupa perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Kegiatan campur tangan pemerintah tersebut dapat berupa penambahan persediaan uang yang beredar atau pembelian barang atau jasa, sehingga diharapkan dengan campur tangan pemerintah tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan belanja

masayarakat yang pada gilirannya mampu mewujudkan kondisi perekonomian yang normal.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (1985:13) mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beragam cara antara lain melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman, dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk PDRB, perhitungannya merupakan gambaran total output barang dan jasa dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam praktiknya, nilai PDRB seringkali dijadikan sebagai indikator makro ekonomi dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dengan cara membandingkan kenaikan/penurunan nilai PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat cara pendekatan (BPS, 2014), yaitu: (1). Pendekatan produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari aktivitas produksi untuk menghasilkan output berupa barang dan/atau jasa. Nilai tambah diperoleh dengan cara mengurangi biaya antara yang digunakan dalam proses produksi dari total nilai output yang diproduksi di semua sektor/subsektor, (2). Pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, serta keuntungan. Komponen tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selain empat komponen tersebut, termasuk juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). (3). Pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara sederhana dirangkum dalam rumus $Y = C + I + G + NX$, dan (4). Pendekatan tidak langsung/alokasi yaitu dengan cara mengalokasikan nilai PDB Nasional untuk masing-masing provinsi dengan alokator tertentu

antara lain dapat berupa nilai produk bruto/netto setiap sektor jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang sesuai.

Dengan pendekatan manapun, nampak bahwa PDRB mampu mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga wajar apabila PDRB dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat/pembangunan ekonomi daerah. Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). ADHB menggunakan harga berlaku yang masih terpengaruh oleh besaran inflasi dalam menghitung nilai aktivitas ekonomi sementara ADHK menggunakan harga konstan yang biasanya ditetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga harga-harga yang berlaku pada tahun-tahun setelahnya disesuaikan terlebih dahulu dengan tahun dasar yang dapat menghilangkan pengaruh inflasi dari harga tersebut pada tahun perhitungan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.

3. Belanja Modal

Menurut PP nomor 24 tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal juga dimaksudkan untuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 klasifikasi utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan

dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dan dapat digunakan pula sebagai sumber dana belanja, khususnya pada belanja investasi salah satunya lewat belanja modal.

5. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi (Sari et al., 2014). Nasution (2015) dalam Rahmawati (2017) menjelaskan dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Maolana Amin Iskandar (2012) mengenai Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Melalui analisis pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kemandirian Fiskal, terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Melalui Regresi data panel. Periode penelitian 2006-2010. Hasil estimasi yang didapat adalah, Kemandirian Fiskal, HDI, dan statistic politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pertumbuhan jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Lalu Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati Anita (2008) Pengaruh Belanja modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Melalui Analisis pengaruh belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Melalui metode OLS. Hasil Estimasi yang didapatkan adalah PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Rahayu (2011) tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Melalui analisis Pengaruh Pengeluaran Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode estimasi dengan Metode Data Panel. Hasil estimasi adalah Variabel Pengeluaran Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Variabel pelayanan Publik mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Hasil penelitian oleh Santika Adhi (2017) tentang analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 dengan metode Data Panel, menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah biasanya dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dan perhitungannya merupakan gambaran total output barang dan jasa dari fungsi input unit-

unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam praktiknya, untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara membandingkan kenaikan/penurunan nilai PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dimana untuk mengukur PDRB ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Salah satunya yaitu pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara sederhana dirangkum dalam rumus $Y = C + I + G + NX$ (Perhitungan PDRB Pendekatan Pengeluaran dalam Lukman Hakim: 2016).

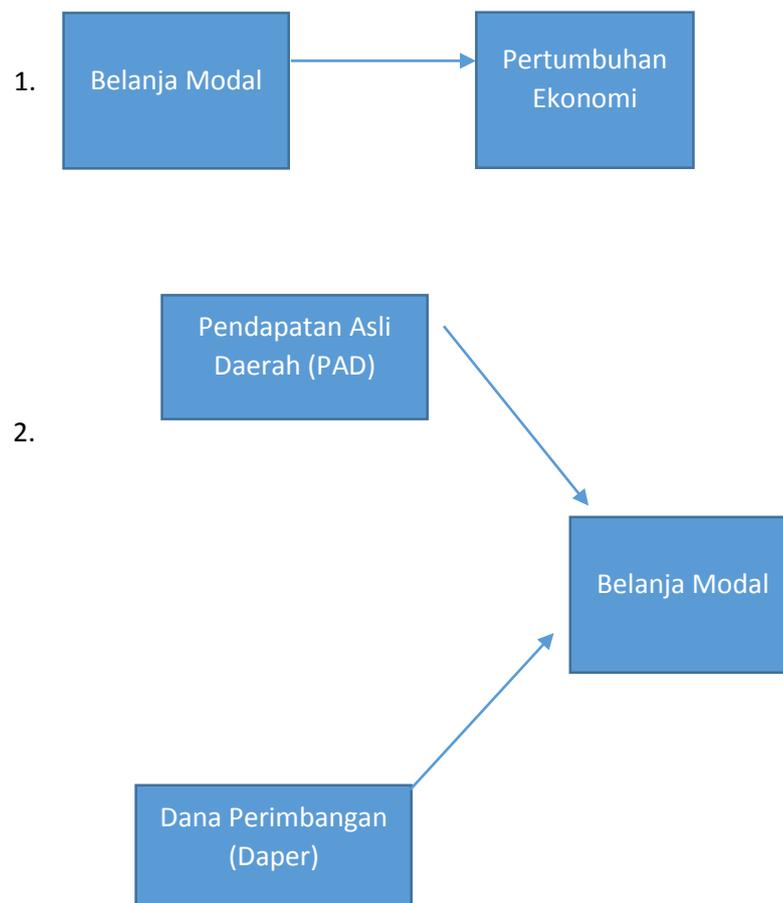
Sehingga terdapat beberapa factor yang dinilai dapat mempengaruhi perhitungan PDRB ini. Namun, dalam penelitian ini untuk mengukur PDRB hanya dibatasi pada pengaruh dari variable konsumsi pemerintah melalui Belanja Modal saja. Karena, belanja modal merupakan salah satu pengeluaran investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah menurut www.anggaran.depkeu.go.id. Lalu, menurut Nurjoni dalam (Anasmen: 2009) menyatakan bahwa, “Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih menyejahterakan masyarakat”. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sodik (2007) dengan hasil kesimpulan adanya pengaruh positif yang signifikan atas pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sampel yang digunakan dalam regresi data panel ini sebanyak 26 provinsi di Indonesia selama periode 1993-2003.

Sedangkan untuk melakukan belanja modal, pemerintah daerah membutuhkan dana awal untuk membiayai belanja modal tersebut. Dimana, besaran dana ini diantaranya bergantung kepada pendapatan daerah yang di era desentralisasi ini, dapat berasal dari daerah itu sendiri atau sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, akibat beberapa faktor, sering kali daerah mengalami kekurangan dana APBD. Dimana, hal ini ditandai dengan belanja daerah yang lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan daerah tersebut. Sehingga, pemerintah daerah menjadi kurang efektif untuk melaksanakan program yang telah direncanakan akibat kurangnya dana. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah ini yaitu kurangnya pendapatan daerah, maka pemerintah pusat

memberikan Dana Perimbangan (Daper) kepada masing-masing daerah. Hal ini, bertujuan untuk mengurangi defisit pada APBD masing-masing daerah, dan dapat juga digunakan untuk menjadi sumber modal yang lain bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pembangunan daerah yang diantaranya dapat melalui belanja modal. Dimana, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santika Adhi (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, terhadap belanja modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri.

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Belanja Modal berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri.
2. Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri periode 2001-2018. Untuk mempermudah pemahaman penelitian, adapun variabel-variabel yang digunakan terdiri dari empat variabel. Pertumbuhan ekonomi(PDRB) dan Belanja Modal (BM) merupakan variabel terikat atau dependent variable. Sedangkan untuk variabel bebas atau independent variable adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper),Belanja Modal(BM).

Metode pengumpulan data sangat penting untuk mempertanggungjawabkan kebenaran ilmiah suatu penelitian, selain itu metode penelitian juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dikehendaki. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2001-2009 dan atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2010-2018 di Kabupaten Kediri bersumber dari Badan Pusat Statistik(BPS).
2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2001-2018 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
3. Data Realisasi Dana Perimbangan (DaPer) Kabupaten Kediri tahun 2010-2018 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK).
4. Data Belanja Modal di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK).

Model persamaan yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1 : Laju Pertumbuhan PDRBit = $\beta_0 + \beta_1 \text{BMit} + \text{etit} \dots \dots \dots (1)$

Di mana:

Laju PDRBit : Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah i pada periode t

BMit: Belanja Modal daerah i pada periode tertentu.

β_0, \dots, β_n : Koefisien regresi (konstan)

etit : error term

Untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan model sebagai berikut

$$\text{BMt} = \beta_0 + \beta_2 \text{PADt} + \beta_3 \text{DPt} + \text{et} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

PAD=Pendapatan Asli Daerah

DP=Dana Perimbangan

β_0 : Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi Masing- Masing Variabel.

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

DP : Dana Perimbangan (Rupiah)

et : Error Term

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2013:95).

D. PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Regresi

Dalam pengujian regresi linier ini, akan diketahui besaran koefisien pengaruh dari Variabel Dependent (Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan (DaPer), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah(LLPDS)) terhadap Variabel Independent Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linier berganda dengan program Eviews 8 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Model 1 : Laju Pertumbuhan PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{BM}_t + \text{etit} \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

Laju PDRB_t : Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah i pada periode t

BM_t: Belanja Modal daerah i pada periode tertentu.

β₀..,β_n : Koefisien regresi (konstan)

etit : error term

Tabel 1. Hasil Pengujian Model Regresi dengan Program Eviews 8

Dependent Variable: PDRB

Method: Least Squares

Date: 01/02/21 Time: 12:32

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+13	5.40E+11	26.99465	0.0000
BM	19.53819	1.645132	11.87636	0.0000
R-squared	0.898120	Mean dependent var		1.99E+13
Adjusted R-squared	0.891753	S.D. dependent var		3.83E+12

S.E. of regression	1.26E+12	Akaike info criterion	58.66784
Sum squared resid	2.54E+25	Schwarz criterion	58.76677
Log likelihood	-526.0106	Hannan-Quinn criter.	58.68148
F-statistic	141.0480	Durbin-Watson stat	1.595102
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data statistic dengan Eviews 8

Tabel 2. Hasil Uji Persamaan Struktural 1, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan (DaPer), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah(LLPDS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

VARIABEL	KOEFISIEN	NILAI Prob.(Uji t)	KETERANGAN
Belanja Modal (BM)	19.53819	0.0000	Signifikan
R-Square : 0.898120			
Nilai Prob.(Uji F) : 0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data statistic Eviews 8

- **Interpretasi Hasil**

Berdasarkan hasil regresi persamaan structural 1 di atas menunjukkan bahwa nilai R-Squared atau koefisien determinasi bernilai sebesar 0.898120. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independent berupa Belanja Modal(BM) mampu menjelaskan varian dari variabel dependent berupa Pertumbuhan Ekonomi(PDRB) sebesar 89,81% sedangkan 10,19% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil Uji-F atau Uji Simultan, diperoleh dari hasil nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.000000. Nilai Probabilitas tersebut, lebih kecil jika dibandingkan dengan $\alpha=5\%$ (0.05). Artinya, bahwa variabel Independent yaitu Belanja Modal(BM) bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu Pertumbuhan Ekonomi(PDRB) di Kabupaten Kediri. Hasil Uji-T (Uji Parsial) menunjukkan angka Probabilitas sebesar 0.0000 (0%). Dimana, nilai probabilitas ini kurang dari atau lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0.05), sehingga variabel Belanja Modal dapat dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu Pertumbuhan

Ekonomi(PDRB). Nilai koefisien pada variabel Belanja Modal(BM) memiliki nilai koefisien sebesar 19.53819. Dengan asumsi bahwa variabel independent lain bernilai 0, maka setiap terjadi kenaikan Rp 1000 pada Belanja Modal(BM) akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar Rp 19.538.

Hasil Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan(Daper), terhadap Belanja Modal(BM)

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linier berganda dengan program Eviews 8 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Persamaan structural 2:

$$BM_t = \beta_0 + \beta_2 PAD_t + \beta_3 DaPer_t + e_t$$

Dimana:

BM=Belanja Modal

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien masing-masing variabel

PAD=Pendapatan Asli Daerah

DaPer=Dana Perimbangan

e = Terms of error/ kesalahan pengganggu

Hasil Uji Regresi Persamaan Struktural 2

Dependent Variable: BM

Method: Least Squares

Date: 03/11/20 Time: 23:54

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.86E+10	4.32E+10	0.429360	0.6738
PAD	0.580322	0.234265	2.477202	0.0256

DAPER	0.177284	0.079201	2.238416	0.0408
R-squared	0.914592	Mean dependent var	2.74E+11	
Adjusted R-squared	0.903204	S.D. dependent var	1.86E+11	
S.E. of regression	5.78E+10	Akaike info criterion	52.55041	
Sum squared resid	5.02E+22	Schwarz criterion	52.69881	
Log likelihood	-469.9537	Hannan-Quinn criter.	52.57087	
F-statistic	80.31342	Durbin-Watson stat	1.779993	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data statistic dengan Eviews 8

Tabel 4.9 Hasil Uji Persamaan Struktural 1, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan (DaPer), terhadap Belanja Modal

VARIABEL	KOEFISIEN	NILAI Prob.(Uji t)	KETERANGAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.580322	0.0256	Signifikan
Dana Perimbangan (DAPER)	0.177284	0.0408	Signifikan
R-Square : 0.914592			
Nilai Prob.(Uji F) : 0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data statistic Eviews 8

- **Interpretasi Hasil**

Berdasarkan hasil regresi persamaan structural 1 di atas menunjukkan bahwa nilai R-Squared atau koefisien determinasi bernilai sebesar 0.914592. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independent berupa Pendapatan Asli daerah(PAD) dan Dana Perimbangan(Daper) mampu menjelaskan varian dari variabel dependent berupa Belanja Modal(BM) sebesar 91,45% sedangkan 8,55% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil Uji-F atau Uji Simultan,

diperoleh dari hasil nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.000000. Nilai Probabilitas tersebut, lebih kecil jika dibandingkan dengan $\alpha=5\%$ (0.05). Artinya, bahwa variabel Independent yaitu Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Perimbangan(Daper) bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu Belanja Modal(BM) di Kabupaten Kediri.

Hasil Uji-T (Uji Parsial) menunjukkan angka Probabilitas yang berbeda antara masing-masing variabel independent. Variabel Pendapatan Asli Daerah(PAD) memiliki Probabilitas sebesar 0.0256 (2,56%). Dimana, nilai probabilitas ini lebih kecil atau kurang dari dari $\alpha=5\%$ (0.05), sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu Belanja Modal(BM). Sedangkan untuk variabel Independent yang lain yaitu Dana Perimbangan(Daper) menunjukkan probabilitas sebesar 0.0408 (4,08%). Dimana, nilai probabilitas ini kurang dari atau lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0.05) sehingga, dapat diartikan variabel independent Dana Perimbangan(Daper) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent Belanja Modal (BM).

Nilai koefisien pada variabel Pendapatan Asli Daerah(PAD) yaitu sebesar 0.580322 (58,03%). Dengan asumsi bahwa variabel independent lain bernilai 0, maka setiap terjadi kenaikan Rp 1000 pada Pendapatan Asli Daerah(PAD) akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp 580. Pada variabel Dana Perimbangan(Daper) memiliki koefisien sebesar 0.177284 (17,72%). Dengan asumsi bahwa variabel independent lain bernilai nol (0), dapat diartikan setiap kenaikan Rp 1000 Dana Perimbangan maka dapat meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp 170.

Uji Asumsi Klasik

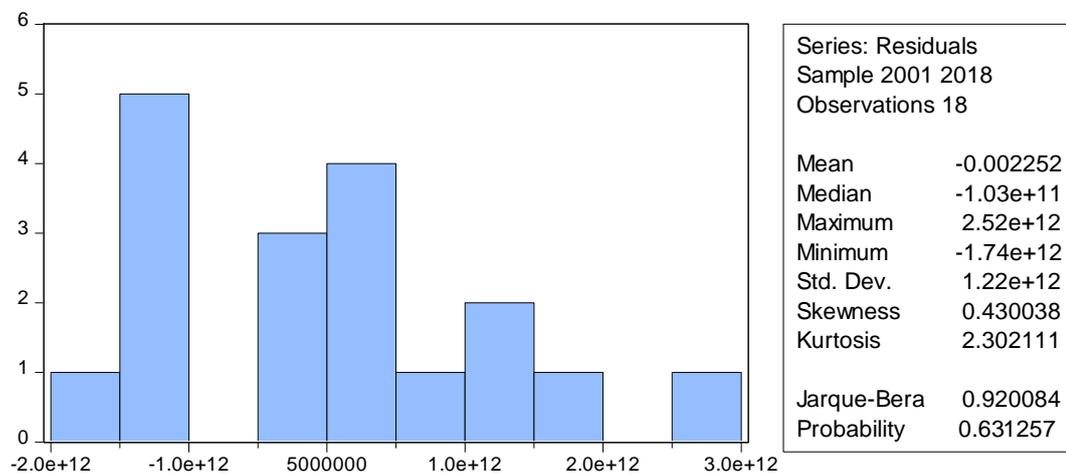
Menurut Imam Ghozali (2011) mengemukakan ada tiga penyiapan asumsi klasik yang cepat terjadi dalam penggunaan model regresi, yaitu Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi , untuk lebih jelas sebagai berikut :

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diliha dari nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih dari

0,5 maka data tersebut normal. Namun, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,5 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil normalitas pada penelitian ini :

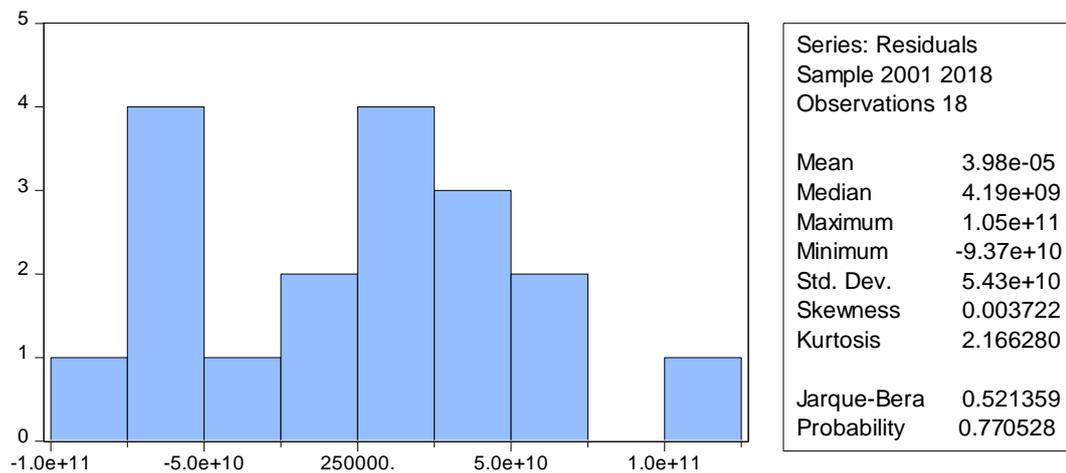
Hasil Uji Normalitas Persamaan 1



Sumber : Hasil Olah data statistic dengan menggunakan program Eviews 8

Probabilitas Jarque-Bera bernilai 0.631257 (63,12%). Nilai probabilitas ini lebih tinggi dari $\alpha=5\%$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi pertama, memiliki distribusi error/residual/disturbance yang normal.

Hasil Uji Normalitas Persamaan 2



Probabilitas Jarque-Bera bernilai 0.770528 (77,05%). Nilai probabilitas ini lebih tinggi dari $\alpha=5\%$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi kedua, memiliki distribusi error/residual/disturbance yang normal.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam suatu model, ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain diuji melalui uji heteroskedastisitas. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dalam model regresi yang baik, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Kriteria pengujiannya adalah, jika nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas > 0.05 , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Breusch Pagan Godfrey dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Uji Heteroskedastisitas model 1

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.385122	Prob. F(2,15)	0.1261
Obs*R-squared	4.343113	Prob. Chi-Square(2)	0.1140
Scaled explained SS	2.234160	Prob. Chi-Square(2)	0.3272

Sumber : Hasil olah data statistik dengan menggunakan Program Eviews 8

Berdasarkan hasil di atas, nilai probabilitas dari nilai Obs*R-Squared menunjukkan hasil 0.1140 (11,40%). Dimana, nilai probabilitas ini lebih dari $\alpha=5\%$ (0.05) yang artinya model regresi pertama tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas model 2

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.449043	Prob. F(5,12)	0.2765
Obs*R-squared	6.776430	Prob. Chi-Square(5)	0.2378
Scaled explained SS	2.744171	Prob. Chi-Square(5)	0.7394

Sumber : Hasil olah data statistic dengan menggunakan Program Eviews 8

Berdasarkan hasil di atas, nilai probabilitas dari nilai Obs*R-Squared menunjukkan hasil 0.2378 (23,78%). Dimana, nilai probabilitas ini lebih dari $\alpha=5\%$ (0.05) yang artinya model regresi kedua tersebut tidak terdapat masalah heteroskendastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi berguna untuk melihat apakah ada masalah yang disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey pada Program Eviews, kriteriannya ialah jika nilai probabilitas < 0.05 maka terdapat masalah autokorelasi, dan jika nilai probabilitas > 0.05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Hasil Uji Autokorelasi model 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.010893	Prob. F(2,14)	0.3890
Obs*R-squared	2.271417	Prob. Chi-Square(2)	0.3212

Sumber: Hasil olah data statistic dengan Eviews 8

Berdasarkan Uji Breusch-Godfrey pada program Eviews, maka diperoleh hasil nilai probabilitas dari nilai Obs*Squared menunjukkan hasil 0.3212(32.12%). Dimana, nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai $\alpha=5\%$ (0.05) yang artinya, model regresi pertama tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Uji Autokorelasi model 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.418979	Prob. F(2,13)	0.1279
Obs*R-squared	4.881907	Prob. Chi-Square(2)	0.0871

Sumber: Hasil olah data statistic dengan Eviews 8

Berdasarkan Uji Breusch-Godfrey pada program Eviews, maka diperoleh hasil nilai probabilitas dari nilai Obs*Squared menunjukkan hasil 0.0871(8.71%). Dimana, nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai $\alpha=5\%(0.05)$ yang artinya, model regresi kedua tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk kuat atau tidaknya korelasi antar variabel independen suatu model. Uji multikolinieritas pada model regresi dilakukan dengan tiga metode yaitu, melihat nilai Variance Inflation Factor(VIF) pada Program Eviews, dengan hasil sebagai berikut:

1. Metode melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF)

Tabel 4.18 Tabel hasil uji multikolinieritas dengan VIF model 1

Variance Inflation Factors

Date: 01/05/21 Time: 22:30

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.92E+23	3.303473	NA
BM	2.706459	3.303473	1.000000

Sumber: Hasil Uji Olah Data Statistik dengan Eviews 8

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai VIF dari ketiga variabel masing-masing lebih kecil dari 10 yaitu, 1.0000 untuk variabel BM (Belanja Modal). Maka artinya, dalam model regresi pertama ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel hasil uji multikolinieritas dengan VIF model 2

Variance Inflation Factors

Date: 01/05/21 Time: 22:32

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient Variance VIF	Uncentered VIF	Centered
C	1.87E+21	10.06627	NA
PAD	0.054880	14.86034	7.481687
DAPER	0.006273	36.32789	7.481687

Sumber: Hasil Uji Olah Data Statistik dengan Eviews 8

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai VIF dari kedua variabel masing-masing lebih kecil dari 10 yaitu, 7.481687 untuk variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dan 7.481687 untuk variable Daper(Dana Perimbangan). Maka artinya, dalam model regresi kedua ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Kesesuaian Model(Goodness of Fit)

Koefisien Determinasi

Pengujian ketetapan model (Goodness of Fit) pertama menggunakan koefisien determinasi (r^2) total dari persamaan yang sudah diuji. Hasil dari persamaan structural 1 (pertama) diperoleh r^2 sebesar 0.898120 (89,81) , yang berarti bahwa kontribusi model dalam menjelaskan hubungan structural dari variabel yang diteliti adalah sebesar 89,81 % dan sisannya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan demikian maka model analisis yang dihasilkan oleh penelitian ini memenuhi nilai ketetapan model yang baik karena nilainya yang mendekati 100%, sehingga model dalam penelitian ini layak untuk diinterpertasikan untuk pengujian hipotesis.

Sedangkan persamaan 2 (kedua) diperoleh nilai r^2 sebesar 0.914592 (91%), yang berarti bahwa kontribusi model dalam menjelaskan hubungan structural dari variabel yang diteliti adalah sebesar 91,45 % dan sisannya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan demikian maka model analisis yang dihasilkan oleh penelitian ini memenuhi nilai ketetapan model yang baik karena nilainya yang mendekati 100%, sehingga model dalam penelitian ini layak untuk diinterpertasikan untuk pengujian hipotesis.

Uji Persamaan Simultan (uji F-Statistik)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kriteria pengujian adalah:

1. Pengujian Simultan Persamaan Struktural Pertama

- Jika probabilitas F-Statistic $< 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan.
- Jika probabilitas F-Statistic $> 0,05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, variabel Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berikut adalah hasil pengujiannya:

Hasil Uji Simultan(Uji F-Statistik) Persamaan Struktural Pertama

R-squared	0.898120	Mean dependent var	1.99E+13
Adjusted R-squared	0.891753	S.D. dependent var	3.83E+12
S.E. of regression	1.26E+12	Akaike info criterion	58.66784
Sum squared resid	2.54E+25	Schwarz criterion	58.76677
Log likelihood	-526.0106	Hannan-Quinn criter.	58.68148
F-statistic	141.0480	Durbin-Watson stat	1.595102
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data statistic dengan Eviews 8.

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, menunjukkan nilai Probabilitas F-Statistik sebesar 0,000000. Dan nilai ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variable Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengujian Simultan Persamaan Struktural Kedua

- Jika probabilitas F-Statistic $< 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, secara simultan memengaruhi Belanja Modal.

- Jika probabilitas F-Statistik >0.05 , maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal .

Berikut adalah hasil pengujiannya:

Hasil Uji Simultan(Uji F-Statistik) Persamaan Struktural Kedua

R-squared	0.914592	Mean dependent var	2.74E+11
Adjusted R-squared	0.903204	S.D. dependent var	1.86E+11
S.E. of regression	5.78E+10	Akaike info criterion	52.55041
Sum squared resid	5.02E+22	Schwarz criterion	52.69881
Log likelihood	-469.9537	Hannan-Quinn criter.	52.57087
F-statistic	80.31342	Durbin-Watson stat	1.779993
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 8

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, menunjukkan nilai Probabilitas F-Statistik sebesar 0.000000. Dan nilai ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil Uji Parsial(Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$.

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

$H_a: \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif variabel Belanja Modal terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

2. $H_0 : \beta_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel Belanja Modal.

Ha: $\beta_3 > 0$, terdapat pengaruh positif variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel Belanja Modal.

3. Ho : $\beta_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh variabel Dana Perimbangan terhadap variabel Belanja Modal.

Ha: $\beta_3 > 0$, terdapat pengaruh positif variabel Dana Perimbangan terhadap variabel Belanja Modal.

Kriteria Signifikansinya adalah :

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika Probabilitas t-hitung $< 0,05$.
2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika Probabilitas t-hitung $> 0,05$.

Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

Dan hasil pengujiannya adalah:

1. Pengujian Pengaruh Parsial Persamaan Struktural Pertama

Persamaan structural 1:

$$PE_t = \beta_0 + \beta_1 BM_t + \epsilon_t$$

Dimana :

BM=Belanja Modal

PE=Pertumbuhan Ekonomi

ϵ = Terms of error/ kesalahan pengganggu

Hasil Uji Parsial Persamaan Struktural Pertama

Dependent Variable: PDRB

Method: Least Squares

Date: 01/02/21 Time: 12:32

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+135	4.0E+11	26.99465	0.0000
BM	19.53819	1.645132	11.87636	0.0000

Sumber: Hasil Olah data statistic Eviews 8

Dari hasil tabel 4.22 di atas diketahui bahwa nilai koefisien β_1 (Belanja Modal) bernilai sebesar 19.53819. Dimana nilai koefisien ini > 0 , maka sesuai dengan kriteria di atas, maka dapat dikatakan variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian untuk melihat signifikansi pengaruh parsial, maka dapat dilihat pada probabilitas t –Statistic. Jika kurang dari atau lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05 , maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan variabel independen, dan begitu juga sebaliknya

Dan dari hasil pada tabel 4.22 di atas, maka diperoleh nilai probabilitas β_1 (Belanja Modal) sebesar 0.0000 . Dimana, nilai ini lebih kecil atau kurang dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Jadi Dapat dikatakan bahwa Variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

2. Hasil Pengujian Pengaruh Parsial Persamaan Struktural Kedua

Persamaan Struktural Kedua:

$$BM_t = \beta_0 + \beta_2 PAD_t + \beta_3 DaPer_t + \epsilon_t$$

Dimana:

β_0 : Konstanta.

β_2, β_3 : Koefisien Regresi Masing- Masing Variabel.

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

DaPer : Dana Perimbangan (Rupiah)

BM : Belanja Modal (Rupiah)

ϵ_t : Error Term

Hasil Uji Parsial Persamaan Struktural Kedua

Dependent Variable: BM

Method: Least Squares

Date: 03/11/20 Time: 23:54

Sample: 2001 2018

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.86E+10	4.32E+10	0.429360	0.6738
PAD	0.580322	0.234265	2.477202	0.0256
DAPER	0.177284	0.079201	2.238416	0.0408

Sumber: Olah data statistic dengan Eviews 8

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien β_2 (Pendapatan Asli Daerah) bernilai sebesar 0.580322. Dimana nilai koefisien ini > 0 , maka sesuai dengan kriteria di atas, maka dapat dikatakan variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Belanja Modal. Kemudian untuk melihat signifikansi pengaruh parsial, maka dapat dilihat pada probabilitas t-Statistic. Jika kurang dari atau lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan variabel independen, dan begitu juga sebaliknya. Dan dari hasil pada tabel di atas, maka diperoleh nilai probabilitas β_2 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0.0256. Dimana, nilai ini lebih kecil atau kurang dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Jadi, dapat dikatakan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien β_3 (Dana Perimbangan) bernilai sebesar 0.177284. Dimana nilai koefisien ini > 0 , maka sesuai dengan kriteria di atas, dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Belanja Modal. Kemudian untuk melihat signifikansi pengaruh parsial, maka dapat dilihat pada probabilitas t-Statistic. Jika kurang dari atau lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan variabel independen, dan begitu juga sebaliknya. Dan dari hasil pada tabel 4.23 di atas, maka diperoleh nilai probabilitas β_3 (Dana Perimbangan) sebesar 0.0408. Dimana, nilai ini lebih kecil atau kurang dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Jadi, dapat dikatakan bahwa Variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

E. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, terhadap Belanja Modal dan peengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri tahun 2001-2018. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan , hasil pengolahan data, dan hasil analisa data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan penelitian ,pada persamaan structural pertama telah dimunculkan hipotesis menyangkut dengan besarnya Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun (2000-2006). Hasil analisis regresi menunjukkan Belanja Modal Pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini didukung oleh uji statistik dimana belanja modal pemerintah Kabupaten Kediri berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB.

Sehingga dengan demikian hipotesis penelitian, dimana Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri tahun (2001-2018) sesuai dengan hasil penelitian. Ini berarti, hipotesis penelitian diterima berdasarkan hasil analisis regresi.

Namun pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni yang pertama hanya membatasi penelitian pengaruh Belanja Pemerintah(G) melalui Belanja Modal(BM) saja tanpa melibatkan komponen Belanja Pemerintah(G) yang lain, dan tidak pula melibatkan komponen Konsumsi Rumah Tangga(C), dan investasi Swasta(I). Sehingga, dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk juga melibatkan beberapa variabel yang tidak turut diteliti pada penelitian ini untuk dilibatkan pada penelitian selanjutnya. Variabel yang dapat dimasukkan seperti antara lain , Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta. Kedua, rentang waktu yang diteliti hanya 18 periode, sehingga menyebabkan penelitian memiliki

jumlah n yang tergolong kecil. Sehingga hasil yang didapat kemungkinan masih terbatas. Dan juga Karena keterbatasan waktu, penelitian ini hanya melihat pengaruh Belanja Modal secara umum, dan tidak terperinci sehingga dapat menjadi saran bagi peneliti lain yang tertarik meneliti penelitian dengan tema serupa.

2. Pada persamaan model structural kedua, hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal . Jadi, apabila terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri, maka Belanja Modal di Kabuapten Kediri juga akan mengalami peningkatan.

Dimana hasil ini sesuai dengan hipotesis yang sudah diutarakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kediri periode 2001-2018. Mengacu pada hasil analisis regresi yang telah dilakukan.

Hal ini dapat disebabkan karena, untuk melakukan belanja modal pemerintah Kabupaten Kediri memang menggunakan sebagian Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

3. Pada persamaan model structural kedua, hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sehingga, apabila terjadi peningkatan pada Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Belanja Modal di Kabupaten Kediri juga akan meningkat pula.

Dengan demikian hipotesis penelitian, dimana Dana Perimbangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kediri tahun (2001-2018) sesuai dengan hasil penelitian. Ini berarti, hipotesis penelitian diterima berdasarkan hasil analisis regresi.

Hal ini dapat disebabkan karena, untuk melakukan belanja modal pemerintah Kabupaten Kediri juga menggunakan sebagian Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan selain menggunakan Pendapatan

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu sebagai berikut,:

1. Saran penelitian lebih lanjut

- Mengikutsertakan variable lain yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi seperti, Konsumsi Rumah Tangga, atau Investasi. Agar, cakupan penelitian lebih luas dan lebih lengkap lagi.
- Memberikan rentang waktu yang lebih panjang, agar hasil yang didapat lebih komprehensif lagi.

2. Saran Kebijakan

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri. Sehingga diharapkan pada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk dapat memaksimalkan Alokasi Belanja Modal atau pada belanja yang bersifat pembangunan dengan begitu Pertumbuhan Ekonomi juga dapat semakin ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.
- Untuk meningkatkan investasi swasta dengan jalan peningkatan penyediaan fasilitas untuk mendorong investasi swasta tersebut. Fasilitas yang dimaksud seperti: peraturan daerah yang jelas tentang investasi, kemudahan investasi, penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang investasi, dan yang tidak kalah pentingnya iklim yang kondusif untuk investasi swasta seperti keamanan.
- Semakin meningkatnya laju Pertumbuhan Ekonomi, maka perlu disertai dengan pembangunan di daerah, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang termasuk

kategori tertinggal secara infrastruktur agar pemerataan pembangunan di setiap daerah dapat terjadi.

Daftar Pustaka

- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006. Tesis. Depok: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.3, No.1 : 140-149
- Ario Pratomo, Wahyu dan Hidayat, Paidi. 2007. *Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam Ekonometrika*. Cetakan Pertama. Medan. USU Press.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Pendekatan Perhitungan PDRB. <https://kedirikab.bps.go.id/>. Diakses Pada 27 Desember 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Belanja Modal Kabupaten Kediri 2011-2017. <https://kedirikab.bps.go.id/>. Diakses Pada 27 November 2018.
- Bratakusumah, dkk. 2001 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Media. Jakarta.
- Damodar N. Gujarati. 2003. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta. Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik)*. Jakarta .PT Indeks.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2*. Jakarta: PT Indeks.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2019.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. 2013. *Belanja Modal*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses Pada 21 Desember 2018.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. 2018. *Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses Pada 27 November 2018.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. 2018. Kapasitas Fiskal Kabupaten Kediri. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses Pada 27 November 2018.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, Lukman. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali). Jawa Timur. Ummiversitas Brawijaya.
- H.A.W.Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Manurung, Gita Fredica. 2010. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung. Lampung. Universitas Lampung
- Mardiasmo, 2002. Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, Abdillah Arif. (2015) dalam Rahmawati (2017). The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In North Sumatera Province. European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research. Vol.3 No.2 PP 70-86
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
- Rahmawati, Masayu dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi 1, no. 1.
- Republik Indonesia. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasedia Pancakarsa
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud. Vol. 3, No. 10:452- 459.
- Sondang.P.Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sidik, Machfud , 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal :Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Batam :Sidang Pleno X ISEI
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1981. Pengantar Ekonomi Makro. Medan : Bina Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno,Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan, Jakarta:Kencana
- Sukirno, Sadono. 2007. Makro ekonomi Modern.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaukani, ad all. 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta

Tang, Bo. (2014). "Real Exchange Rate and Economic Growth in China :Cointegrasi
VAR Approach".China Economic Review.Hal : 293-310.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah).
Yogyakarta: UUP STIM YKPN.